

SKRIPSI

**STATUS TANPA KEWARGANEGARAAN KOMUNITAS BIDOON DI
KUWAIT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM
NASIONAL KUWAIT**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

YUYUN RIANG MENTARI MENDROFA

2010111019
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Pembimbing:

Dr. Mardenis, S.H., M.Si

Zimtya Zora, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2026

No.Reg:12/PK-VI/IV/2026

	No. Alumni Universitas	Yuyun Riang Mentari Mendrofa	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang/28 April 2002 b. Nama Orang Tua : Alm. Benaso Mendrofa c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Internasional e. NIM : 2010111019		f. Tanggal Lulus : 26 Agustus 2026 g. Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h. Lama Studi : 6 Tahun i. IPK : j. Alamat : Jln. Koto Panjang No. 75, Padang, Sumatera Barat

STATUS TANPA KEWARGANEGARAAN KOMUNITAS BIDOON DI KUWAIT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL KUWAIT

(Yuyun Riang Mentari Mendrofa, 117 Halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2026)

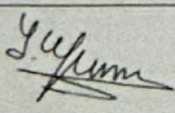
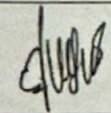
ABSTRAK

Status tanpa kewarganegaraan merupakan suatu kondisi hukum ketika seseorang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun berdasarkan hukum yang berlaku. Komunitas Bidoon di Kuwait merupakan salah satu kelompok yang mengalami kondisi tersebut. Pada periode sebelum pertengahan 1980-an, Bidoon masih memperoleh sejumlah hak dan layanan dasar, namun seiring perkembangan kebijakan dan penerapan hukum kewarganegaraan Kuwait, akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan dokumen identitas semakin terbatas. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan hukum internasional terhadap status tanpa kewarganegaraan, serta bagaimanakah kesesuaian penerapan hukum kewarganegaraan Kuwait dengan ketentuan hukum internasional yang relevan terkait status tanpa kewarganegaraan Komunitas Bidoon. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), melalui kajian terhadap UDHR 1948, Konvensi 1954, Konvensi 1961, ICERD 1965, ICCPR 1966, CEDAW 1979, CRC 1989, *UNHCR Guidelines on Statelessness*, serta hukum nasional Kuwait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status tanpa kewarganegaraan Bidoon berlangsung antargenerasi akibat penerapan prinsip *jus sanguinis* melalui garis keturunan ayah dan belum efektifnya mekanisme pencegahan pewarisan status tersebut. Mekanisme penyelesaian status Bidoon juga belum transparan dalam memberikan pengakuan kewarganegaraan dan perlindungan hukum. Penerapan hukum kewarganegaraan Kuwait terhadap Komunitas Bidoon masih menunjukkan adanya kesenjangan dengan ketentuan hukum internasional yang relevan, khususnya dalam pemenuhan hak atas kewarganegaraan dan hak-hak dasar. Dengan demikian, penerapan hukum kewarganegaraan Kuwait terhadap Komunitas Bidoon belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum internasional yang relevan, khususnya dalam mencegah keberlanjutan status tanpa kewarganegaraan antargenerasi dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar.

Kata Kunci: Status Tanpa Kewarganegaraan, Komunitas Bidoon, Kuwait, Hukum Internasional

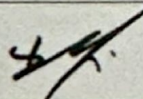
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 26 Agustus 2026.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama	Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.	Dewi Enggriyeni, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Internasional: Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. Alumni University	Yuyun Riag Mentari Mendrofa	No. Alumni Faculty
	a. Place/Date of Birth : Padang/April 28, 2002 b. Parent Name : Alm. Benaso Mendrofa c. Faculty : Law d. Concentration : International Law e. NIM : 2010111019	f. Graduation Date : August 26, 2026 g. Pass Predicate : Very Satisfactory h. Length Of Study : 6 Years i. GPA : j. Address : Koto Panjang Street No. 75, Padang City, West Sumatra	

**THE STATELESSNESS OF THE BIDOON COMMUNITY IN KUWAIT: AN ANALYSIS
UNDER INTERNATIONAL LAW AND KUWAITI NATIONAL LAW**

(Yuyun Riag Mentari Mendrofa, 117 Pages, Faculty of Law, University of Andalas 2026)

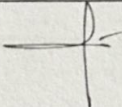
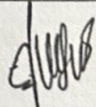
ABSTRACT

Statelessness is a legal condition in which a person is not recognized as a citizen by any country under applicable law. The Bidoon community in Kuwait is one such group facing this situation. Prior to the mid-1980s, the Bidoon still enjoyed certain basic rights and services; however, as Kuwaiti citizenship policies and laws evolved, their access to education, healthcare, employment, and identity documents became increasingly restricted. The research questions in this study include: How does international law address statelessness, and to what extent does the application of Kuwaiti citizenship law align with relevant international legal provisions regarding the statelessness of the Bidoon community? This study employs a normative legal methodology using both the statutory approach and the case-based approach, through an analysis of the 1948 UDHR, the 1954 Convention, the 1961 Convention, the 1965 ICERD, the 1966 ICCPR, the 1979 CEDAW, the 1989 CRC, the UNHCR Guidelines on Statelessness, and Kuwaiti national law. The results of the study indicate that the stateless status of the Bidoon persists across generations due to the application of the *jus sanguinis* principle through the paternal line and the ineffectiveness of mechanisms to prevent the inheritance of this status. The mechanisms for resolving the Bidoon's status also lack transparency in granting citizenship recognition and legal protection. The application of Kuwaiti citizenship law to the Bidoon community still reveals gaps with relevant international legal provisions, particularly regarding the fulfillment of the right to citizenship and fundamental rights. Thus, the application of Kuwaiti citizenship law to the Bidoon community is not yet fully in line with relevant international legal provisions, particularly in preventing the intergenerational perpetuation of statelessness and ensuring the fulfillment of fundamental rights.

Keywords: Statelessness, Racial Discrimination, Bidoon Community, Kuwait, International Law

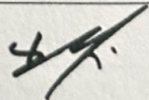
This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate by August 26, 2026.

Examiner,

Signature	1. 	2. 
Name	Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.	Dewi Enggriyeni, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of International Law: **Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.**


Signature

Alumni has been registered in the Faculty/University under the number:

	Faculty/University:	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: